



2025

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN



**Dinas komunikasi dan informatika
Kabupaten Lamongan**

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran Diskominfo tahun 2025 dapat diselesaikan. Sebagai implementasi dari Undang-Undang nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat Renja, dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Anggaran Kabupaten Lamongan tahun 2025.

Renja Perubahan Anggaran ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi personil di Diskominfo Kabupaten Lamongan dalam menyusun prioritas-prioritas program dan kegiatan pada tahun 2025, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja Perubahan Anggaran ini dapat terpenuhi seluruhnya.

Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi upaya kita dalam melanjutkan pembangunan untuk mewujudkan Kabupaten Lamongan yang sejahtera dan lebih baik.

Lamongan, 2025

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMONGAN**



SUGENG WIDODO, S.Sos., M.M.
Perpina Utama Muda
NIP. 19681219 198903 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud Dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD ..	16
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	19
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	21
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	21
3.2 Perubahan Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	22
3.3 Perubahan Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025	25
BAB IV PENUTUP	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja Perubahan Anggaran DISKOMINFO memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DISKOMINFO. Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 79 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan. DISKOMINFO mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika serta persandian dan statistik.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan Tahun 2025 digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perubahan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 ini disusun melalui perencanaan yang bersifat bottom-up. Bidang-bidang di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai ujung tombak pelayanan wajib menyusun rencana program dan kegiatan dengan mengembangkan konsep mandiri sehingga kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan prioritas pelayanan dari masing - masing kegiatan tersebut. Pimpinan selaku pemegang kebijakan memberikan arahan dalam menentukan program-program prioritas yang disesuaikan dengan program Pemerintah Kabupaten Lamongan bidang komunikasi dan informatika dan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun yaitu selama Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum atau yang mendasari adanya Renja DISKOMINFO adalah :

- a) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- b) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonrsia Nomor 4737);

- g) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Nefara Republik Indonesia Nomor 4817);
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan RKPD;
- j) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
- k) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);

- l) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021;
- m) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 80 Tahun 2020 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran DISKOMINFO Kabupaten Lamongan adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk satu periode tahun anggaran yang berpedoman pada Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025–2029, dalam menyusun rencana program/kegiatan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan.

Sedangkan *Tujuan* penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran DISKOMINFO Kabupaten Lamongan Tahun 2025 adalah :

- a) Menjadi pedoman bagi DISKOMINFO Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan seluruh kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
- b) Menjadi acuan bagi DISKOMINFO Kabupaten Lamongan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025 dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik.
- c) Menciptakan kepastian dan sinergisitas perencanaan program kegiatan pelayanan publik.
- d) Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Perangkat Daerah Diskominfo Kabupaten Lamongan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN,

Bab ini memuat :

- 1.1 Latar belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat :

- 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD s/d Triwulan II Tahun 2025 dan capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat :

- 3.1 Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi;
- 3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran PD Tahun 2025;
- 3.3 Perubahan Program Dan Kegiatan PD Tahun 2025.

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Diskominfo Tahun Anggaran 2024, dilaksanakan untuk 1) mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2) mengetahui realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3) mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui :

- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi fahtor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Renja Perubahan Anggaran Diskominfo Kabupaten Lamongan pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Diskominfo Kabupaten Lamongan selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2025.

Pada Tahun 2024 total anggaran Diskominfo Kabupaten Lamongan sebesar 14.976.706.948,- dengan rincian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota Rp. 5.266.572.368,- Program Informasi dan Komunikasi Publik Rp. 4.685.534.580,- Program Aplikasi Informatika Rp. 4.620.000.000,- Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Rp. 354.600.000,- dan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Rp. 50.000.000,- yang dialokasikan untuk pelaksanaan 5 program dan 12 kegiatan.

Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar 14.336.789.325,- dengan rincian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota Rp. 4.755.636.051,- Program Informasi dan Komunikasi Publik Rp. 4.596.557.614,- Program Aplikasi Informatika Rp. 4.590.970.900,- Program Penyelenggaraan Statistik Sektor Rp. 353.165.498,- dan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Rp. 40.459.262,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 95,73%.

Pada Tahun 2025 total anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 12.766.909.599,- yang dialokasikan untuk pelaksanaan 5 program dan 10 kegiatan.

Dari jumlah dana tersebut s/d Triwulan II bulan Juni terealisasi sebesar Rp. 4.322.011.473,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 33,85%. Evaluasi hasil Renja Perangkat daerah tahun 2025 dan pencapaian Renstra Diskominfo Kabupaten Lamongan sampai dengan Triwulan II adalah sebagaimana tabel berikut :

Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu tahun 2025 kami perkirakan bahwa pelaksanaan program / kegiatannya akan sesuai dengan target rencana. Pencapaian kinerja tahun 2025 belum dapat dikaitkan dengan pencapaian target pencapaian kinerja tahunan dalam Rencana Strategis Diskominfo Periode 2021-2026, dikarenakan Rencana Kerja 2025 masih dalam tahun berjalan.

Evaluasi hasil Renja Perangkat daerah tahun 2024 dan pencapaian Renstra Diskominfo Kabupaten Lamongan sampai dengan tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2025
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lamongan

No	Sasaran Renja	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2025			Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2025 s/d Triwulan II		Catatan/ Keterangan
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10= (9/8)	11	12	13
	Meningkatnya Implementasi e-GOV	2	16	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Internal Dinas Komunikasi dan Informatika	86	84.51	85			85		
		2	16	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	35 Dokumen	52 Dokumen	13 Dokumen	2 Dokumen	15%	13 Dokumen	2 Dokumen	
		2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	24 Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen	40%	5 Dokumen	2 Dokumen	
		2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Dokumen	28 Dokumen	8 Dokumen			8 Dokumen		
		2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	70 Dokumen	74 Dokumen	14 Dokumen	6 Dokumen	43%	14 Dokumen	6 Dokumen	
		2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27 Pegawai	28 Pegawai	28 Pegawai	28 Pegawai	100%	28 Pegawai	28 Pegawai	
		2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	4 Laporan	1 Laporan			1 Laporan		
		2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	60 Laporan	56 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	12 Laporan	6 Laporan	

No	Sasaran Renja	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2025			Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2025 s/d Triwulan II		Catatan/ Keterangan
											Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisais	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10= (9/8)	11	12	13
		2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian dengan baik	100%	100%						
		2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	2 Paket						
		2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24 Orang	12 Orang						
		2	16	01	2.05	10	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Persediaan Barang dan Jasa Yang Tepat Waktu	60 Laporan	56 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	12 Laporan	6 Laporan	
		2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	1 Paket			1 Paket		
		2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	1 Paket			1 Paket		
		2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	4 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	
		2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	4 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	
		2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50%	1 Dokumen	1 Dokumen	
		2	16	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 Laporan	48 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	12 Laporan	6 Laporan	
		2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu yang disediakan	48 Laporan	48 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	12 Laporan	6 Laporan	

No	Sasaran Renja	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2025			Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2025 s/d Triwulan II		Catatan/ Keterangan
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10= (9/8)	11	12	13
		2	16	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan parasaran yang dibutuhkan	100%	100%						
		2	16	01	2.07	05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	1 Paket						
		2	16	01	2.07	05 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		2	16	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	48 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	12 Laporan	6 Laporan	
		2	16	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	48 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	12 Laporan	6 Laporan	
		2	16	01	2.08	04 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		2	16	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	8 Unit	2 Unit			2 Unit		
		2	16	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit	32 Unit	9 Unit	1 Unit	11%	9 Unit	1 Unit	
		2	16	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	87 Unit	25 Unit	8 Unit	32%	25 Unit	8 Unit	
		2	16	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	15 Unit	9 Unit	3 Unit			3 Unit		

No	Sasaran Renja	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2025			Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2025 s/d Triwulan II		Catatan/ Keterangan
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisais	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (9/8)	11	12	13
		2 16 02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Informasi Publik	35.00%	9.75%	30.00%	9.75%	32.50%	25.00%	9.75%	
		2 16 02 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah informasi publik yang tersampaikan	10.990 Informasi	9.541 Informasi	2.270 Informasi	349 Informasi	15%	2.270 Informasi	349 Informasi	
		2 16 02 2.01 03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	20 Dokumen	10 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	50%	4 Dokumen	2 Dokumen	
		2 16 02 2.01 04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	20 Dokumen	10 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	50%	4 Dokumen	2 Dokumen	
		2 16 02 2.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	20 Dokumen	10 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	50%	4 Dokumen	2 Dokumen	
		2 16 02 2.01 06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	20 Dokumen	10 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	50%	4 Dokumen	2 Dokumen	
		2 16 02 2.01 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	1000 Orang	225 Orang	4 Orang	2 Orang	50%	4 Orang	2 Orang	
		2 16 02 2.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	20 Dokumen	14 Dokumen						
		2 16 02 2.01 14	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	24 Laporan	6 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	12 Laporan	6 Laporan	

No	Sasaran Renja	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2025			Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2025 s/d Triwulan II		Catatan/ Keterangan
											Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10= (9/8)	11	12	13
		2	16	02	2.01	15	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	20 Komunitas		10 Komunitas			10 Komunitas		
		2	16	02	2.01	17	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	10 Informasi		5 Informasi			5 Informasi		
		2	16	02	2.01	19	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	2.000 Informasi	368 Informasi	1.000 Informasi	368 Informasi	37%	1.000 Informasi	368 Informasi	
		2	16	02	2.01	21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1 Media	1 Media	1 Media	1 Media	100%	1 Media	1 Media	
		2	16	02	2.01	23	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	6000 Konten	499 Konten	3000 Konten	499 Konten	17%	3000 Konten	499 Konten	
		2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi Terintegrasi	65%	47.61%	55%	47.61%	87%	55%	47.61%	
		2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub	Jumlah PD yang telah menggunakan domain dan sub domain resmi	30 OPD	23 OPD	13 OPD	6 OPD	46%	13 OPD	6 OPD	
		2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2000 Unit	425 Titik	475 Titik	425 Titik	94%	450 Titik	425 Titik	
		2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah	Jumlah PD yang e-GOV nya terintegrasi	20 PD	16 PD	4 PD	2 PD	50%	4 PD	2 PD	
		2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20 Dokumen	10 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	50%	4 Dokumen	2 Dokumen	

No	Sasaran Renja	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2025			Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2025 s/d Triwulan II		Catatan/ Keterangan
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisais	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (9/8)	11	12	13
		2 16 03 2.02 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	30 Unit	33 Unit	4 Unit	3 Unit	75%	4 Unit	3 Unit	
		2 16 03 2.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	15 Aplikasi	6 Aplikasi	3 Aplikasi			3 Aplikasi		
		2 16 03 2.02 09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen		
		2 16 03 2.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen			170 Orang		
		2 16 03 2.02 16	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	
		2 16 03 2.02 18	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	2 Dokumen		1 Dokumen			1 Dokumen		
		2 16 03 2.02 19	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	2 Dokumen		1 Dokumen			1 Dokumen		
		2 16 03 2.02 20	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	6 Aplikasi		3 Aplikasi			3 Aplikasi		

Act

No	Sasaran Renja	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2025			Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2025 s/d Triwulan II		Catatan/ Keterangan
											Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10= (9/8)	11	12	13
		2	16	03	2.02	23	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	73 Unit		73 Unit			73 Unit		
		2	16	03	2.02	24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	73 PD	73 PD	73 PD	73 PD	100%	73 PD	73 PD	
		2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data statistik sektoral yang dipublikasikan	20.200 Data	11.465 Data	4.200 Data			4.200 Data		
		2	20	2	2.01	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	500 Orang	260 Orang	160 Orang	80 Orang	50%	160 Orang	80 Orang	
		2	20	2	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen		
		2	20	2	2.01	07	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	320 Orang	80 Orang	160 Orang	80 Orang	50%	160 Orang	80 Orang	
		2	20	2	2.01	10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	146 Dokumen		73 Dokumen			73 Dokumen		

No	Sasaran Renja	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2025			Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2025 s/d Triwulan II		Catatan/ Keterangan
											Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisais	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10= (9/8)	11	12	13
		2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK	Persentase pengamanan sistem elektronik dan informasi	40%	7.69%	35%	7.69%	22%	35%	7.69%	
		2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Jumlah Informasi layanan sistem elektronik yang telah diamankan	5 Informasi	3 Inforamsi	1 Inforamsi			1 Inforamsi		
		2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	10 Laporan	13 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	12 Laporan	6 Laporan	
		2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	Jumlah PD yang melakukan tata kelola persandian	25 PD	17 PD	5 PD	2 PD	40%	5 PD	2 PD	
		2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	72 PD	72 PD	72 PD	72 PD	100%	72 PD	72 PD	

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja diatas, disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Komunikasi dan Informatika didukung oleh 5 program, dimana di dalamnya terdiri dari 1 program pendukung dan 4 program utama yang mana target kinerjanya telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Target kinerja program yang telah tercapai, meliputi :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Program informasi dan komunikasi publik
 - c. Program Aplikasi Informatika
 - d. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - e. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
2. Untuk mendukung pelaksanaan dari program yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo memiliki 10 kegiatan yang terdiri dari 5 kegiatan pendukung dan 5 kegiatan utama yang mana target kinerja dari semua kegiatan tersebut telah teralisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya realisasi program/kegiatan yang sesuai dengan target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan adalah :

- a. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai harapan;
- b. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.
- c. Adanya sumber daya aparatur, sarana, dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024 dan tahun 2025 s/d Triwulan II yang selaras dengan pencapaian target masing-masing kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel T.C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lamongan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jumlah masyarakat yang menerima informasi melalui kegiatan desiminasi dan pendistribusian informasi		Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website)	2.9%	3%	3.1%	3.2%	3.2%	3.3%	3.4%	Terpenuhi
			Adanya media tradisional seperti pertunjukan rakyat	2.9%	3%	3.1%	3.2%	3.2%	3.3%	3.4%	
			Adanya media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya	2.9%	3%	3.1%	3.2%	3.2%	3.3%	3.4%	
			Adanya media luar ruangan seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho	2.9%	3%	3.1%	3.2%	3.2%	3.3%	3.4%	
2	Jumlah anggota UMKM dan KIM yang diberdayakan		Adanya cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok informasi Masyarakat di tingkat Kecamatan	2.9%	3%	3.1%	3.2%	3.2%	3.3%	3.4%	Terpenuhi

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun Isu-isu penting dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan adalah :

1. Implementasi e-Government

Implementasi e-Government di Kabupaten Lamongan berkembang cukup signifikan, oleh karena itu perlu terus dikembangkan di berbagai aspek yang mendorong tercapainya efektifitas dan efisiensi kinerja dan pelayanan publik yang mencakup antara lain : Infrastruktur, aplikasi, Kelembagaan, perencanaan dan kebijakan pada seluruh perangkat daerah di Kabupaten Lamongan. Sangatlah urgent untuk dilakukan pengintegrasian sistem-sistem aplikasi yang ada di seluruh perangkat daerah, sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas dalam kinerja dan pelayanan publik. Sampai pada Tahun 2019, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan telah melakukan pengintegrasian pada aplikasi perencanaan (e-Planning), penganggaran (e-Budgetting) dan Pengawasan dan pelaporan (e-Controlling), Aplikasi

SIAPMAN dan e-Performance dan terus dikembangkannya aplikasi SI-LALA serta tetap dikembangkannya infrastruktur jaringan TIK, terutama jaringan TIK berbasis F.O (Fiber Optic) sehingga dapat diwujudkan kecepatan pelayanan jaringan, sehingga kinerja OPD-OPD dan fungsi pelayanan publik dapat maksimal dan juga tetap dikembangkannya Lamongan Digital Society (LADISO) dan Lamongan Smart City.

2. Data Center, Comand Center dan Media Center

Pembangunan data center yang baik dan terintegrasi diharuskan mempunyai beberapa sarana penunjang yang dapat diintegrasikan antara peralatan satu dengan peralatan yang lainnya dan berfungsi sesuai dengan standarisasi yang berlaku. Desain dan pembangunan data center yang baik dengan terintegrasi diharuskan mengacu pada standarisasi internasional dan implementator yang akan membangun data center. Adapun manfaat data center sebagai upaya mendorong percepatan pelaksanaan e-government di Kabupaten Lamongan yang semakin berkembang, serta memberikan akses data dan informasi bagi aparatur dan masyarakat yang mudah, cepat, efektif dan efisien. Pada tahun berjalan Dinas Kominfo Kabupaten Lamongan terus mengembangkan command center dan media center.

3. Tuntutan Publik akan Keterbukaan Informasi dan Transparansi

Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Saat ini masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadikan tantangan besar bagi jajaran pemerintah dan masyarakat untuk mampu melaksanakannya serta menjadi wajib hukumnya bagi badan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

4. Pemberdayaan dan Peran Aktif Masyarakat dalam Penyebarluasan Informasi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian pesat membuat masyarakat kini tak lagi hanya sekedar konsumen informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Namun masyarakat kini adalah sumber (source), saluran (channel) dan penerima (receiver) informasi itu sendiri. Hal ini kemudian menjadikan paradigma penyampaian informasi yang top-down tidak lagi relevan untuk diterapkan. Masyarakat harus dipandang sebagai khalayak aktif yang mampu memproduksi, menyampaikan dan mengonsumsi informasi sekaligus. Hal ini mau tidak mau menjadikan paradigma penyampaian informasi yang bottom-up adalah yang paling relevan untuk diterapkan saat ini. Paradigma baru komunikasi sosial ini mengandung konsekuensi logis yaitu masyarakat harus diberdayakan agar mampu menjadi agen penyebarluasan informasi tepat sasaran, produsen informasi yang sehat dan konsumen informasi yang cerdas. Disinilah peran strategis pemerintah untuk menjalankan program pemberdayaan (empowering) tersebut dengan menggali potensi masyarakat, penyediaan fasilitas komunikasi dan menghimpun serta menciptakan jejaring antar kelompok-kelompok komunikasi sosial yang tersebar di masyarakat.

2.4 Penelaahan Usulan Program Kegiatan masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Diskominfo sebagai Perangkat Daerah dengan tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika serta persandian dan statistik.

Oleh karena itu Diskominfo dalam hal ini mengkoordinasikan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang nantinya ditujukan langsung kepada Perangkat Daerah terkait.

Tabel T.C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Lamongan

Nama PD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA				
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Ketapangtehu, Kab. Lamongan, Karangbinangun, Ketapangtehu	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	1 titik	Instalasi Internet Desa (Dusun Net)
		Dusun Karangbinangun Desa Karangbinangun, Kab. Lamongan, Karangbinangun, Karangbinangun		1 titik	Pemasangan free wifi di area publik
		desa tambakmenjangan, Kab. Lamongan, Sarirejo, Tambakmenjangan		1 titik	Instalasi Internet Desa (Dusun Net)
		desa tambakmenjangan, Kab. Lamongan, Sarirejo, Tambakmenjangan		1 titik	Pemasangan free wifi di area publik
		Dusun Klateng, Kab. Lamongan, Tihung, Takeranklateng		1 titik	Pemasangan free wifi di area publik
		Wedoro, Kab. Lamongan, Giagah, Wedoro		1 titik	Pemasangan free wifi di area publik
		Perummas Sukomulyo RT. 06 RW. 05, Kab. Lamongan, Lamongan, Sukomulyo		1 titik	Pemasangan free wifi di area publik
		Desa Windu, Kab. Lamongan, Karangbinangun, Windu		1 titik	Pemasangan free wifi di area publik
		kedungsoko, Kab. Lamongan, Manhup, Kedungsoko		1 titik	Pemasangan free wifi di area publik

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telaahan Terdapat Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi

Berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimana berdasar rumpun urusan, maka urusan persandian dan statistik serumpun dengan urusan komunikasi dan informatika

Kebijakan Nasional Pemerintah sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025, adalah :

1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
2. Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritimanan
 - ❖ Penyediaan infrastruktur telekomunikasi :
 - a) Penyediaan akses internet, WLAN/LAN, Fiber Optic
 - b) Pembangunan BTS
 - ❖ Pengembangan infrastruktur TIK menuju e-digital
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif
 - ❖ Pengembangan statistik pariwisata
 - ❖ Pengembangan statistik ekonomi kreatif
4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air
 - ❖ Penyempurnaan statistik pertanian dan perikanan
5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu
 - ❖ Peningkatan kualitas dan keterbukaan informasi
 - ❖ Penguatan kelembagaan siber dan pengamanan aktivitas siber nasional

Berdasar telaahan RKP 2025, Diskominfo Kabupaten Lamongan mengimplementasikan RKP point ke 2 yaitu Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritimanan dengan jalan : Penyediaan akses internet, WLAN/LAN, Fiber Optic serta Pembangunan BTS

3.2 Perubahan Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil Bupati terpilih pada pemilukada yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Sebagaimana disampaikan pada pemaparan visi dan misi calon Bupati/Wakil Bupati di sidang DPRD dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2045 dan RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031, Visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025- 2029 serta RPJM Nasional Tahun 2025-2029. Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029, adalah:

“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan”

Pemahaman atas pernyataan visi mencerminkan tekad dan komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mewujudkan daerah yang maju, unggul, serta dikenal luas dalam berbagai bidang, terutama sosial dan ekonomi.

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

- 1) **Terwujudnya**, mengandung arti upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan dalam rangka mencapai kejayaan lamongan dan keadilan bagi masyarakat.
- 2) **Kejayaan** diartikan sebagai kondisi daerah yang mampu bersaing secara regional maupun nasional, ditopang oleh kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan berkarakter.

3) **Berkelanjutan** dalam visi ini menegaskan pentingnya kesinambungan pembangunan yang adil dan merata, tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan hidup serta harmoni sosial. Kabupaten Lamongan berkomitmen membangun sistem pembangunan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama, solidaritas, dan toleransi, sehingga masyarakat yang majemuk dapat hidup berdampingan secara damai.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2025-2029, **“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan”** ditempuh melalui lima misi sebagai berikut.

Misi 1.

Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan, dengan maksud bahwa misi ini dimaksudkan untuk Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan, meningkatkan pengetahuan industry kecil dan menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (start up).

Misi 2.

Mewujudkan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berahklak dan Adaptif Terhadap Perubahan Zaman, dengan maksud bahwa misi ini dimaksudkan untuk Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing.

Misi 3.

Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Mantap dan Berwawasan Lingkungan, dengan maksud bahwa misi ini dimaksudkan untuk Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan.

Misi 4.

Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dalam Harmoni Sosial Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Berbudaya Dan Partisipatif Dalam Pembangunan, dengan maksud bahwa misi ini dimaksudkan untuk Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat yang Memperhatikan Kearifan Lokal.

Misi 5.

Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berdampak Melalui Digitalisasi Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel dan Responsif, dengan maksud bahwa misi ini dimaksudkan untuk Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa.

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 5 (lima) dan Tujuan 5 (lima) dari RPJMD Kabupaten Lamongan.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis Diskominfo Tahun 2025 – 2029, yaitu :

Tujuan

- Mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik governance (e-GOV)

Indikator : Indeks SPBE

Sasaran

- a. Meningkatnya implementasi e-GOV

Indikator :

- 1. Persentase PD yang e-GOVnya terintegrasi

3.3 Perubahan Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan Tahun 2025.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan melaksanakan 3 Urusan yaitu :

- A. Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika
- B. Urusan Pemerintah Bidang Statistik
- C. Urusan Pemerintah Bidang Persandian

A. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika diimplementasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

-
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Informasi Dan Komunikasi Publik

- a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/kota
- Relasi Media
 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
 - Pelayanan Informasi Publik
 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - Penyusunan Konten

3. Program Aplikasi Informatika

- a. Penyelenggaraan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota
 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
 - Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE
 - Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas
 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

- a. Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup pemda
 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

- a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik
- b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Operasionalisasi jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota

TABEL 3.1
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

Nama PD : Dinas Komunikasi dan Informatika

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran			Keterangan
							Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang	
						(2)		(3)		(4)		(5)			(6)	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						12,474,226,599.00	12,474,226,599.00	-		
	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Internal Dinas Komunikasi dan Informatika	85	Nilai IKM Internal Dinas Komunikasi dan Informatika	85	Diskominfo	Diskominfo	5,407,150,599.00	5,407,150,599.00	-	
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	13 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	13 Dokumen	Diskominfo	Diskominfo	105,938,500.00	105,938,500.00	-	
	2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Diskominfo	Diskominfo	7,228,500.00	7,228,500.00		
	2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	Diskominfo	Diskominfo	98,710,000.00	98,710,000.00		
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	14 Dokumen	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	14 Dokumen	Diskominfo	Diskominfo	4,414,405,223.00	4,414,405,223.00	-	
	2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Pegawai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Pegawai	Diskominfo	Diskominfo	4,385,539,723.00	4,385,539,723.00		
	2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Diskominfo	Diskominfo	14,410,000.00	14,410,000.00		
	2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	Diskominfo	Diskominfo	14,455,500.00	14,455,500.00		
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Persediaan Barang dan Jasa Yang Tepat Waktu	12 Laporan	Jumlah Laporan Persediaan Barang dan Jasa Yang Tepat Waktu	12 Laporan	Diskominfo	Diskominfo	212,121,800.00	212,121,800.00	-	
	2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Diskominfo	Diskominfo	9,683,000.00	9,683,000.00	-	
	2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Diskominfo	Diskominfo	60,313,700.00	60,313,700.00	-	
	2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Diskominfo	Diskominfo	35,141,600.00	35,141,600.00	-	
	2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Diskominfo	Diskominfo	19,313,500.00	19,313,500.00	-	
	2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Diskominfo	Diskominfo	22,200,000.00	22,200,000.00	-	
	2	16	01	2.06	08	Facilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Diskominfo	Diskominfo	15,470,000.00	15,470,000.00	-	
		16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu yang disediakan	12 Laporan	Jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu yang disediakan	12 Laporan	Diskominfo	Diskominfo	50,000,000.00	50,000,000.00	-	
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia dengan baik	100%	Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia dengan baik	100%	Diskominfo	Diskominfo	403,511,000.00	403,511,000.00	-	
	2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Diskominfo	Diskominfo	77,000,000.00	77,000,000.00	-	
	2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Diskominfo	Diskominfo	326,511,000.00	326,511,000.00	-	

2	16	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	Diskominfo	Diskominfo	271,174,076.00	271,174,076.00	-	
2	16	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Diskominfo	Diskominfo	55,960,000.00	55,960,000.00	-	
2	16	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perincian Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perincian	9 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perincian	9 Unit	Diskominfo	Diskominfo	87,013,576.00	87,013,576.00	-	
2	16	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	Diskominfo	Diskominfo	103,979,500.00	103,979,500.00	-	
2	16	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Diskominfo	Diskominfo	24,221,000.00	24,221,000.00	-	
2	16	02		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Informasi Publik	30%	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Informasi Publik	30%	Diskominfo	Diskominfo	3,183,367,500.00	3,183,367,500.00	-	
2	16	02	2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Jumlah informasi publik yang tercapaian	2.270 Informasi	Jumlah informasi publik yang tercapaian	2.270 Informasi	Diskominfo	Diskominfo	3,183,367,500.00	3,183,367,500.00	-	
2	16	02	2.01	14 Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi diwan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 Laporan	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi diwan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 Laporan	Diskominfo	Diskominfo	1,475,084,500.00	1,475,084,500.00	-	
2	16	02	2.01	15 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	10 Komunitas	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	10 Komunitas	Diskominfo	Diskominfo	155,007,000.00	155,007,000.00	-	
2	16	02	2.01	17 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	5 Informasi	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	5 Informasi	Diskominfo	Diskominfo	25,042,500.00	25,042,500.00	-	
2	16	02	2.01	19 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan urutan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1.000 Informasi	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan urutan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1.000 Informasi	Diskominfo	Diskominfo	115,148,500.00	115,148,500.00	-	
2	16	02	2.01	21 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbasis sesuai kriteria/indikator	1 Media	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbasis sesuai kriteria/indikator	1 Media	Diskominfo	Diskominfo	1,142,000,000.00	1,142,000,000.00	-	
2	16	02	2.01	23 Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	3000 Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	3000 Konten	Diskominfo	Diskominfo	271,085,000.00	271,085,000.00	-	
2	16	03		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi Terintegrasi	55%	Persentase Aplikasi Terintegrasi	55%	Diskominfo	Diskominfo	3,883,708,500.00	3,883,708,500.00	-	
2	16	03	2.02	Penyelenggaraan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah PD yang e-GOV nya terintegrasi	4 PD	Jumlah PD yang e-GOV nya terintegrasi	4 PD	Diskominfo	Diskominfo	3,883,708,500.00	3,883,708,500.00	-	
2	16	03	2.02	16 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	Diskominfo	Diskominfo	178,213,000.00	178,213,000.00	-	
2	16	03	2.02	18 Koordinasi penyusunan dan/atau revisi arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang disuulkan	1 Dokumen	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang disuulkan	1 Dokumen	Diskominfo	Diskominfo	70,915,000.00	70,915,000.00	-	
2	16	03	2.02	19 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	Diskominfo	Diskominfo	75,570,000.00	75,570,000.00	-	
2	16	03	2.02	20 Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	3 Aplikasi	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	3 Aplikasi	Diskominfo	Diskominfo	296,800,000.00	296,800,000.00	-	
2	16	03	2.02	23 Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	73 Unit	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	73 Unit	Diskominfo	Diskominfo	50,000,000.00	50,000,000.00	-	
2	16	03	2.02	24 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	73 PD	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	73 PD	Diskominfo	Diskominfo	3,212,210,500.00	3,212,210,500.00	-	
2	20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							180,945,500.00	180,945,500.00	-	
2	20	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun pembangunan daerah	100%	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun pembangunan daerah	100%	Diskominfo	Diskominfo	180,945,500.00	180,945,500.00	-	
2	20	02	2.01	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup pemda	Jumlah data statistik sektoral yang dipublikasikan	4.200 Data	Jumlah data statistik sektoral yang dipublikasikan	4.200 Data	Diskominfo	Diskominfo	180,945,500.00	180,945,500.00	-	
2	20	2	2.01	07 Penguatan Kapasitas Kelenjuran Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	160 Orang	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	160 Orang	Diskominfo	Diskominfo	59,996,300.00	59,996,300.00	-	
2	20	2	2.01	10 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	73 Dokumen	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	73 Dokumen	Diskominfo	Diskominfo	120,949,200.00	120,949,200.00	-	

Activate Windows

	2	21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							111,737,500.00	111,737,500.00	-	
I	2	21	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase pengamanan sistem elektronik dan informasi	35%	Persentase pengamanan sistem elektronik dan informasi	35%	Diskominfo	Diskominfo	111,737,500.00	111,737,500.00	-	
	2	21	02	2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi layanan sistem elektronik yang telah diamankan	1 Informasi	Jumlah Informasi layanan sistem elektronik yang telah diamankan	1 Informasi	Diskominfo	Diskominfo	62,997,500.00	62,997,500.00	-	
	2	21	02	2.01	03 Pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	Diskominfo	Diskominfo	62,997,500.00	62,997,500.00	-	
	2	21	02	2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PD yang melakukan tata kelola persandian	5 PD	Jumlah PD yang melakukan tata kelola persandian	5 PD	Diskominfo	Diskominfo	48,740,000.00	48,740,000.00	-	
	2	21	02	2.02	01 Operasionalisasi jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	72 PD	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	72 PD	Diskominfo	Diskominfo	48,740,000.00	48,740,000.00	-	
												12,766,909,599	12,766,909,599	-	

Lamongan, Juni 2025
 KEPALA DINAS
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN LAMONGAN

SI GENG WIDODO, S.Sos., M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19681219 198903 1 004

BAB IV

PENUTUP

a. Kesimpulan

Kesimpulan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Anggaran menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru. Output Rencana Kerja Perubahan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan adalah Program Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan. RENJA Perubahan Anggaran Diskominfo Kabupaten Lamongan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja DISKOMINFO. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Perubahan Anggaran Tahun 2025, RENJA Perubahan Anggaran juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Diskominfo Kabupaten Lamongan. RENJA Perubahan Anggaran juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Diskominfo Kabupaten Lamongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

b. Catatan Penting

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Anggaran menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung

jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Output Rencana Kerja Perubahan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan adalah Program Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan.

RENJA Perubahan Anggaran Diskominfo Kabupaten Lamongan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja DISKOMINFO. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Diskominfo Kabupaten Lamongan. RENJA Perubahan Anggaran juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Diskominfo Kabupaten Lamongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

c. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran Diskominfo Kabupaten Lamongan Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Diskominfo Kabupaten Lamongan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

d. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Anggaran Tahun 2025, selanjutnya Renja Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Lamongan, 2025

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMONGAN**



SUGENG WIDODO, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681219 198903 1 004